
OTONOMI PENDIDIKAN DI ERA INDUSTRI 4.0

Jonson Rajagukguk¹, Maringan Panjaitan², Dian Sri Rezeki Lumban Gaol³, Silvia Decmerry Natalia Gea⁴

¹²Dosen Tetap Prodi Administrasi Publik Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan

³⁴Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fisipol UHN Medan

jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

ABSTRAK : Pendidikan adalah alat satu-satunya dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Melalui pendidikan diharapkan sumber daya manusia bisa terwujud dengan baik. Itulah sebabnya tata kelola pendidikan yang bagus berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan. Selama ini tata kelola pendidikan di negara Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Tata kelola itu belum fokus pada upaya membangun lulusan yang bermutu. Tata kelola hanya dilakukan dengan rutinitas tanpa ada upaya yang konkrit bagaimana mengangkat mutu pendidikan kita. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, pendidikan menengah adalah wewenang dari pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten. Otonomi pendidikan yang memebrikan wewenang luas itu seharusnya serta merta mendongkrak mutu pendidikan kita karena adanya limpahan wewenang yang banyak, termasuk dalam hal mengelola masalah keuangan. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah dalam mengelola otonomi pendidikan, khususnya di era industri 4.0 saat ini tentu jadi sebuah pertanyaan yang harus di jawab oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di era otonomi pendidikan saat ini.

Kata Kunci: *Otonomi Pendidikan*

ABSTRACT: education is the only tool in building a civilization of a nation. It is hoped through education that human resources can be properly realized. That is why good governance of education has a positive effect on the quality of education. The Indonesian government has always been less than expected. It has not focused on the efforts of quality graduates. Governance is simply a matter of routine without any concrete effort on how to improve our education. Especially in today's autonomy, secondary education is the authority of the provincial government as well as of the district. Education autonomy that contributes to such vast authority should directly contribute to the quality of our education because of the abundance of authority, including in managing financial problems. In the second quarter of 2007, bank Indonesia the central bank/bi decided to raise its key rate by 25 basis points to 8.25 percent.

Key Word: *Autonomous Education*

PENDAHULUAN

Dalam teori manajemen salah satu unsur yang mendukung keberhasilan dalam melakukan tugas adalah adanya pendelegasian wewenang. Dengan adanya pendelegasian wewenang berarti ada kepercayaan yang di berikan kepada bawahan. Memberi kepercayaan kepada bawahan tentu sebuah sikap yang sangat dibutuhkan dalam proses manajemen yang berhasil. Menurut Hasibuan (2007:68), Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh *delegator* (pemberi wewenang) kepada *delegate* (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama *delegator*. Menurut Stoner (2000:434) pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan

tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Pendelegasian wewenang adalah konsekuensi dari semakin besarnya organisasi.

Dalam praktek manajemen pemerintahan di negara Republik Indonesia konsep otonomi daerah sudah lama berlangsung. Otonomi daerah merupakan upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dengan tujuan pembangunan itu bisa mengangkat derajat hidup masyarakat daerah melalui pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah.

Salah satu yang jadi topik pembahasan di era otonomi daerah saat ini adalah otonomi pendidikan. Saat ini pada level pendidikan dasar dan menengah adalah wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang mengelolanya. Apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar otonomi pendidikan ini bisa berhasil dengan baik adalah tugas yang mungkin butuh inovasi dan kreasi yang sangat besar. Saatnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten punya peta jalan untuk mengelola otonomi pendidikan ini dengan baik.

Saat ini tantangan jaman makin kompleks dan besar. Kita mengenal sebuah kemajuan jaman yang disebut dengan era industri revolusi 4.0. jaman industri 4.0 adalah buah dari sistem berpikir dan kreasi manusia karena lompatan kemajuan teknologi informasi yang sangat besar. Bagi yang siap dengan mengadopsi nilai –nilai perubahan, maka akan mampu bertahan. Bagi yang tidak mau berubah maka dengan sendirinya akan mengalami ketertinggalan. Untuk itu, dalam konteks proses manajemen pemerintahan, dimana otonomi pendidikan ini adalah sebuah desain kebijakan pemerintah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengelolanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar mampu mengelola pendidikan dengan baik dan benar di era industri 4.0 ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana penulis melakukan studi kepustakaan dengan mengelaborasi berbagai literatur sehingga memebrikan sebuah gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dihadapi, yakni bagaimana masa depan otonomi pendidikan di era industri 4.0 saat ini.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan topik bahasan dengan melihat latar belakang di atas bagaimana masa depan otonomi pendidikan di era industri 4.0, ada kalanya kita bisa mendeskripsikan apa itu industri 4.0 tersebut. Dengan demikian strategi apa yang akan dilakkukan oleh pemrintah provinsi dan kabupaten untuk bisa menghadapinya tentu membutuhkan desain strategi yang jelas. Untuk itu pemahaman industri 4.0 adalah sebuah pemahaman yang sangat penting dan perlu dilakukan.

Pertama-tama, mari kita bahas awal mula dari Revolusi Industri 4.0 terlebih dahulu. Mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman, pada tahun 2011 lalu di acara *Hannover Trade Fair*. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, dimana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini dan tidak lama menjadikan gagasan ini sebuah

gagasan resmi. Setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk kelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan Industri 4.0 .

Pada 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan Revolusi Industri 4.0 di acara *World Economic Forum* (WEF). Jerman sendiri menggelintirkan modal sebesar €200 juta untuk menyokong akademisi, pemerintah, dan pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis mengenai Revolusi Industri 4.0. Tidak hanya Jerman yang melakukan penelitian serius mengenai Revolusi Industri 4.0, namun Amerika Serikat juga menggerakkan *Smart Manufacturing Leadership Coalition* (SMLC), sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik Revolusi Industri 4.0.

Saat ini kita berada di zaman dimana Revolusi Industri 4.0 baru saja dimulai. Lalu seperti apa sebenarnya Revolusi Industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Dimana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan Revolusi Industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah *Smart Factory*. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan *on time* saat dibutuhkan, melalui jaringan internet. Sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet.

Bila kita melihat kembali Revolusi Industri 3.0 dimana merupakan titik awal dari era *digital revolution*, yang memadukan inovasi di bidang Elektronik dan Teknologi Informasi. Ada perdebatan apakah Revolusi Industri 4.0 cocok disebut sebagai sebuah revolusi industri atau hanya sebuah perluasan atau pengembangan dari Revolusi Industri 3.0. Namun nyatanya, perkembangan Revolusi Industri 3.0 ke Revolusi Industri 4.0 sangat signifikan, hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era Revolusi Industri 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari Revolusi Industri 4.0, dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di Industri 4.0, diantaranya *Internet of Things* (IoT), *Big Data*, percetakan 3D, *Artificial Intelligence* (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah *Internet of Things*.

IoT (*Internet of Things*) memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era Revolusi Industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang dimana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktifitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun.

Selain *Internet of Things*, ada juga istilah *Big Data* yang berperan penting dalam Revolusi Industri 4.0. *Big data* adalah seluruh informasi yang tersimpan di *cloud computing*. Analitik data besar dan komputasi awan, akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan

produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6c, yaitu *connection, cyber, content/context, community, dan customization*. Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik. Data diproses dengan alat canggih (analitik dan algoritma) untuk menghasilkan informasi yang logik. Data yang diproses tersebut juga dapat membantu mempertimbangkan adanya masalah yang terlihat dan tidak terlihat di pabrik industri. Algoritma pembuatan informasi harus mampu mendeteksi masalah yang tidak terlihat seperti degradasi mesin dan kehausan komponen.

Kemajuan jaman yang kita kenal dengan istilah industri 4.0 akan diperhadapkan dengan sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan otonomi pendidikan. Sebelum berbicara mengenai otonomi pendidikan, tentu kita harus berbicara mengenai otonomi daerah dulu. Sebagaimana yang kita ketahui secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan. Maka otonomi dapat berarti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/ kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan sendiri, arti tersebut dikembangkan menjadi “pemerintah sendiri” (Ubaedillah: 2014). Hadirnya otonomi daerah ini tentu memberikan sebuah harapan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi dan kabupaten dapat mendorong pengembangan potensi daerahnya masing-masing yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta ‘kewenangan bidang lain’ dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, secara substansial menunjukkan bahwa kabupaten dan kota memegang peranan penting dalam kewenangan dan pembiayaan.

Demikian halnya dengan kebijakan untuk pengembangan pendidikan, tentu akan mengalami ketergantungan atas kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan yang dilimpahkan melalui otonomi pengelolaan pendidikan yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, efisien dan efektif, serta mampu menjawab perubahan jaman yang semakin maju, seperti era industri 4.0 saat ini. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan atau sekolah. Kewenangan tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi daerah yang ada.

Otonomi dibidang pendidikan tidak berhenti pada daerah tingkat kabupaten/kota tetapi sampai pada tingkat sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya ~~pengalihan kewenangan~~ pada level sekolah, maka sekolah diharapkan mampu menentukan arah pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah yang ada. Menurut Umiarso dan Gojali. Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi dikenal dengan manajemen berbasis sekolah yang merupakan perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada pemerintah pusat beralih ke pengelolaan pendidikan pada pola manajemen dimana sekolah tersebut yang mengelolanya. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “*school-based management*” istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan

masyarakat setempat¹⁰. Paradigma manajemen ini muncul ketika masyarakat Amerika Serikat sudah tidak lagi mendapatkan manfaat yang signifikan atas keberadaan lembaga pendidikan, dimana output pendidikan cenderung menjauh dari realitas sosialnya.

Sehingga pendidikan harus direformasi menuju pendidikan yang mampu melibatkan masyarakat dan memiliki dampak langsung atas output pendidikan. “Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, Otonomi yang diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa MBS merupakan sebuah paradigma manajemen yang mengarusutamakan otonomi dan pelibatan masyarakat, otonomi pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola institusinya, selain itu juga institusi pendidikan diharapkan mampu menemukan relevansinya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pendidikan.

Menurut Danim (2006) , kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (*BOMM*). Dana tersebut disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya.

Menurut Umiarso dan Gojali (2010) adapun Kementerian Pendidikan Nasional mendeskripsikan bahwa tujuan pelaksanaan MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola serta memberdayakan sumber daya yang ada yang tersedia; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Menurut Hasbullah dalam bidang pendidikan, otonomi mampu membebrdayakan aparat yang bergeak di bidang pendidikan dengan harapan hasilnya akan lebih maksimal. Dibidang pendidikan sendiri otonomi diberikan sampai pada tingkat sekolah. Otonomi persekolahan diharapkan memperbaiki pelayanan, menata organisasi sekolah, mencari, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan.

Menurut Kemendiknas dalam Sujanto (2007) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah:

1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.
2. Tata Kelola Kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Menurut Hasbullah . Kurikulum kelembagaan pendidikan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk masyarakat, yaitu kelembagaan pendidikan yang bersandarkan pada komunitas masyarakat.
3. Pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.
4. Pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.
6. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepatasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
7. Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. Menurut Umiarso dan Gojali Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional manajemen berbasis sekolah. Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien.

-
8. Hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. Menurut Mulyasa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa di sekolah.
 9. Pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan- kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

PENUTUP

Otonomi daerah adalah hal yang sangat bagus secara sistem dan pendekatan sistem ini sangat cocok untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sedang kita galakkan. Untuk itu, otonomi daerah dengan didorong oleh otonomi pendidikan adalah hal yang ahrus kita lakukan agar era industri revolusi 4.0 bisa kita antisipasi dengan baik. Inovasi dan kreativitas adalah hal yang tidak bisa kita hindari saat ini karena ini sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan paradigma yang inovatif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ubaedillah, A. (2014): *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education)*. Jakarta Kencana.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Sujanto, Bedjo. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah; Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Umiarso dan Imam Ghozali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2010.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional